



**BUPATI PASURUAN  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN BUPATI PASURUAN  
NOMOR 133 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PASURUAN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Republik Indonesia Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 244 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 157) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023;
20. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 41 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 41 Seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 204);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 290) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 8 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 336);
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 12);
24. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 112 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 Nomor 112).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

3. Bupati adalah Bupati Pasuruan.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disingkat RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

#### **Pasal 2**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### **Pasal 3**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 berpedoman pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan hasil evaluasi Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun lalu.

#### **Pasal 4**

(1) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 disusun dengan sistematika penyusunan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU,

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH,

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH,

BAB V : PENUTUP.

(2) Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **Pasal 5**

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi pedoman bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menyusun RKA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan  
pada tanggal 2 Agustus 2023

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

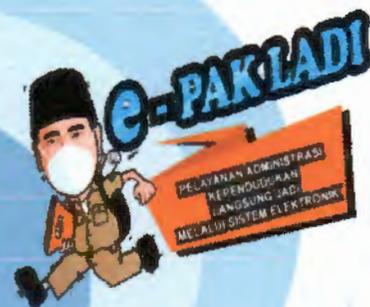
pada tanggal 2 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

YUDHA TRIWIDYA SASONGKO

BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2023 NOMOR 133



# RENCANA KERJA **RENJA** TAHUN 2024



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASURUAN**

Jl. Raya Raci KM.09 Komplek Perkantoran  
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan  
Email : [dispencapil@pasuruankab.go.id](mailto:dispencapil@pasuruankab.go.id)

**RENCANA KERJA  
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL  
KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

Urusan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan merupakan salah satu sektor utama yang berkaitan dengan isi strategis dan masalah mendesak yang harus diprioritaskan dalam pembangunan di Kabupaten Pasuruan, karena menyangkut hak dasar masyarakat yang harus dipenuhi dalam upaya memenuhi sasaran yang harus diemban, yaitu meningkatkan kepemilikan dokumen administrasi kependudukan sebagai bukti otentik identitas penduduk. Dokumen administrasi kependudukan tersebut meliputi Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Kematian, Surat Pindah, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pencatatan Sipil lainnya.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan selaku instansi pemerintah menjalankan setiap kebijakan manajemen daerah. Sedangkan sebagai organisasi adalah keharusan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menetapkan mekanisme yang mampu menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Sebelum pelaksanaan program dan kegiatannya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan harus membuat Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan satuan kerja untuk satu tahun kedepan, yang didalamnya mengacu pada Rencana Strategi yang telah ditetapkan pada periode lima tahunan.

Dalam Rencana Kerja mempunyai muatan berupa program dan kegiatan, lokasi kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan perkiraan kebutuhan dana untuk tahun berikutnya. Indikator kinerja memuat ukuran spesifik secara kuantitatif dan kualitatif hasil yang akan dicapai dari program. Untuk menetapkan suatu indikator atas tiap sasaran yang disepakati dengan legislatif lengkap atas target yang harus di capai setiap tahun. Indikator ini bersifat indikator kinerja outcome (hasil).

Pada saat yang bersamaan, Pemerintah Kabupaten Pasuruan mewajibkan satuan kerja di bawah kendalinya untuk mendukung capaian sasaran dengan cara

menetapkan indikator input, output dan outcome sesuai dengan karakteristik dan tupoksi satuan kerja yang bersangkutan. Indikator kinerja input yang digunakan adalah dana dengan satuan rupiah, sedangkan indikator output yang digunakan bervariasi tergantung pada jenis sasaran yang ditetapkan.

Seperti juga pada indikator output, indikator kinerja outcome yang digunakan juga bervariasi tergantung pada sasaran yang ingin dicapai. Namun demikian terdapat suatu kesamaan yang merumuskan indikator kinerja outcome maupun output, yaitu indikator tersebut menggambarkan sejauh mana Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

## **1.2. Landasan Hukum**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 ini adalah :

1. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700)
5. Undang–Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322 ) ;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019, tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor xxx Tahun 2023, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2022 tentang hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor : 52 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 -2024
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender ;
22. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 56 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 154 Tahun 2022 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan;
23. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengarusutamaan Gender ;
24. Peraturan Bupati Pasuruan No.12 Tahun 2023 Tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026;
25. Peraturan Bupati Pasuruan Nomor xx Tahun 2023 tentang Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026 ;

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah :

- a. Menjabarkan arahan umum Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- b. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.
- c. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumber daya dan dana yang akan dijadikan salah satu kekuatan pelayanan masyarakat.
- d. Memberikan arah dan sekaligus tolok ukur keberhasilan pelayanan masyarakat.

Sedangkan yang menjadi tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 adalah :

- a. Mensinkronkan usulan program/kegiatan hasil forum Perangkat Daerah dengan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan yang dituangkan dalam rancangan awal Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.
- b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang sudah dibahas secara partisipatif antar bidang di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan
- c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan secara kronologis dan berkelanjutan.
- d. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pelayanan masyarakat .

#### **1.4. Sistematika Penulisan**

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 mengikuti sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** : **Pendahuluan**

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**1.1. Latar Belakang**

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RPD, Renstra Perangkat Daerah dengan Renja dan Renja provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah .

### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah .

### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPENDUK CAPIL TAHUN LALU**

### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dispendum Capil Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dispendum Capil

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dispendum Capil tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dispendum Capil sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dispendum Capil berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

### 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dispendum Capil

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dispendum Capil berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dispenduk Capil berisikan uraian mengenai:
- a. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan Dispenduk Capil dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dispenduk Capil ;
  - b. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dispenduk Capil;
  - c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
  - d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dispenduk Capil dan ;
  - e. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD, berisikan uraian mengenai:
- a. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  - b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
  - c. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda;
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

### **BAB III : TUJUAN, SASARAN, DISPENDUK CAPIL**

#### **3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional**

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dispenduk Capil.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dispenduk Capil**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dispenduk

Capil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dispenduk Capil.

**3.3. Program , Kegiatan dan Sub kegiatan**

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program, kegiatan dan Sub kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program Kegiatan dan Sub kegiatan.
- c. Penjelasan jika rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program, kegiatan dan sub kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPENDUK  
CAPIL**

Berisikan uraian mengenai Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan selama 1 (Satu) tahun ke depan, disertai indikator kinerja program maupun indikator kinerja kegiatan dan Sub Kegiatan serta pendanaan indikatif yang dibutuhkan.

**BAB V : PENUTUP**

Berisikan uraian penutup, berupa:

- 5.1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- 5.2. Kaidah-kaidah pelaksanaan.

# **BAB II**

## **HASIL EVALUASI RENJA**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN**

### **LALU**

#### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tahun Lalu dan Capaian Renstra**

Selama tahun 2022 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang sangat signifikan atas sasaran-sasaran strateginya. Hal ini secara nyata dapat ditunjukkan melalui pencapaian sasaran stratejik yang berada dalam ruang lingkup sesuai tugas pokoknya, yaitu membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.

Lebih jauh lagi apabila dipandang dari perspektif Pemerintah Kabupaten Pasuruan secara keseluruhan, maka hasil capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan selama tahun 2022 akan menjadi sangat berarti dalam memberikan kontribusi bagi pencapaian sasaran strategis Pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Strategis Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 – 2026.

Meskipun demikian, hasil pencapaian tersebut akan menjadi lebih bermakna apabila dapat digunakan sebagai masukan-masukan dalam proses pengambilan keputusan guna meningkatkan kinerjanya di masa-masa mendatang, khususnya terhadap target-target kinerja yang ingin dicapai dalam Rencana Kinerja.

Jumlah program dan kegiatan tahun 2022 serta dana dan realisasi anggaran 2022 urusan kependudukan dan pencatatan sipil untuk belanja langsung sebesar Rp.13.755.203.006,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 12.524.317.432,00 atau 91,05 % dipergunakan untuk program antara lain : Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Penataan Administrasi Kependudukan, Program Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Program Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil, dan Program Pengelolaan Informasi Kependudukan

Sedangkan realisasi kinerja tahun 2022 sbb ;

Dalam urusan kependudukan, kepemilikan KK bagi penduduk yang sudah berkeluarga merupakan salah satu kewajiban masyarakat. Jumlah penduduk Kabupaten Pasuruan pada tahun 2022 berdasarkan data pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mencapai 1.606.907 Jiwa. Jumlah keluarga yang telah memiliki KK pada tahun 2022 mencapai 763.896 keluarga atau 98.20 % dari jumlah keluarga wajib KK, yaitu sebanyak 770.051 keluarga. Bila dibandingkan tahun 2021 nilai capaiannya masih lebih tinggi. Berdasarkan data **DKB (Data Konsolidasi Bersih)** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan jumlah penduduk tahun 2022 mencapai 1.606.907 Jiwa.

Adapun untuk data prosentase penduduk wajib KK yang memiliki KK dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :  
 Perkembangan prosentase kepemilikan KK di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :

Tahun	Kewajiban memiliki KK di Kabupaten Pasuruan
	Prosentase Penduduk ber KK
2018	94,04%
2019	96,04%
2020	98,05%
2021	98,10 %
2022	98,20 %

Perkembangan prosentase kepemilikan KK di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2022, dapat digambarkan sebagai berikut :



Pelayanan KIOS E-PAK LADI Penerbitan Kartu Keluarga



Sumber data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan grafik tersebut diatas, memperlihatkan bahwa prosentase kepemilikan KK melampaui target yang ditetapkan dari 98,18% menjadi 98,20 % yakni mencapai 101%, jika dilihat dari angka pencapaian KK di tahun 2021 untuk peningkatan dan perkembangan jumlah penduduk prosentase kepemilikan KK mengalami peningkatan pada tahun 2022.

**a. Prosentase penduduk KTP yang Memiliki KTP**

Kesadaran penduduk untuk memiliki KTP pada tahun 2022 mengalami peningkatan. Prosentase penduduk wajib KTP dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang memiliki KTP baik KTP Konvensional maupun KTP Elektronik dibandingkan dengan penduduk wajib KTP dikalikan 100%. Jumlah penduduk yang sudah ber-KTP sebesar 1.199,555 jiwa atau 98,65% dari target Penduduk yang usia 17 Tahun Ke atas atau wajib KTP yaitu sebesar 1.215.946 jiwa.

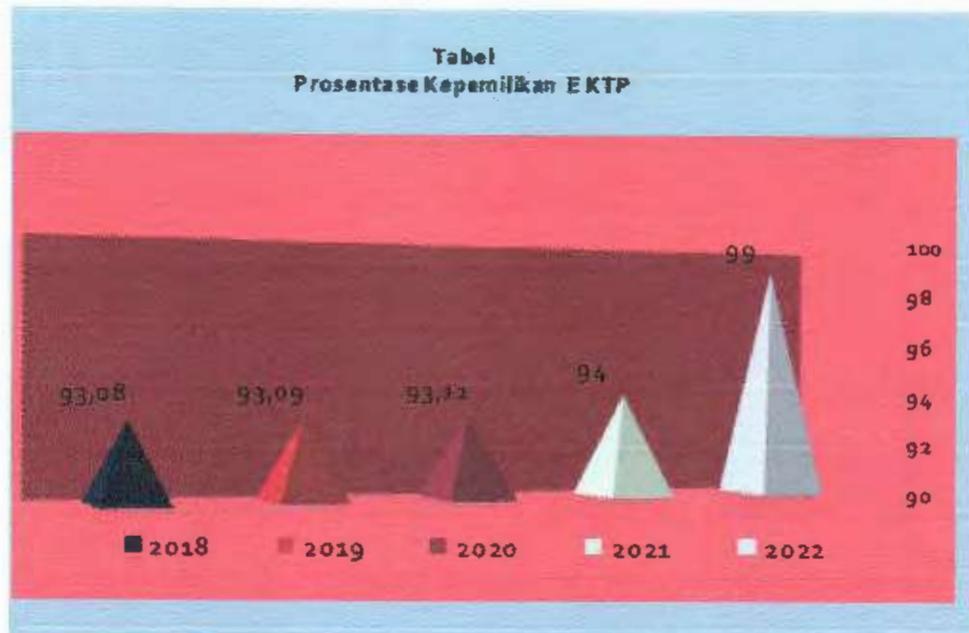
Adapun untuk data prosentase penduduk wajib KTP yang memiliki KTP dari tahun 2018 sampai dengan 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tahun	Kewajiban Memiliki KTP di Kabupaten Pasuruan	
	Prosentase Penduduk ber KTP	
2018	93,08 %	
2019	93,09 %	
2020	93,11 %	
2021	99,14 %	
2022	98,65 %	

Berdasarkan tabel tersebut di atas, terlihat bahwa prosentase kepemilikan KTP di Kabupaten Pasuruan dari tahun 2022 mengalami peningkatan apabila dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya. Sebelumnya pada tahun 2021 jumlah penduduk yang memiliki KTP sebesar atau 99,14 % dari target wajib KTP, hal ini dikarenakan meningkatnya kesadaran penduduk untuk memiliki KTP, untuk selengkapnya dapat dilihat pada grafik berikut ini :



Pelayanan "SI MANIS DUDUK MANJA" Penerbitan E-KTP



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### **b. Prosentase Kepemilikan Akta Kelahiran**

Jumlah kepemilikan akta kelahiran per 1.000 penduduk dihitung dengan membandingkan jumlah penduduk yang ber-akta kelahiran dengan jumlah penduduk sebesar 1.606.907 dikalikan 1.000. Kepemilikan akta kelahiran pada tahun 2022 sebesar 1.528.178 Akta maka kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk sebesar 806 orang atau sebesar 80 % dari target 80,63 %.

Capaian ini meningkat dibanding tahun 2021. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kelahiran, dan dibarengi dengan kesadaran masyarakat untuk segera melakukan pengurusan akta kelahiran. Kondisi yang terjadi kepada masyarakat kita adalah mereka baru akan melakukan pengurusan akta kelahiran apabila dalam kondisi terdesak untuk sesuatu kepentingan, misalnya untuk pendaftaran ibadah haji, pengurusan pasport, persyaratan

perkawinan, pendaftaran pegawai negeri dan TNI/POLRI, pengangkatan anak, pembagian warisan dan lain-lain. Akan tetapi bila dibandingkan dengan 2021 kepemilikan akta kelahiran mengalami peningkatan, pada tahun 2022 akta kelahiran sebesar 80,63 % dengan tingkat capaian 100 % dari target 80 %. Adapun data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran (per 1.000 penduduk)  
Tahun 2018-2022**

Tahun	Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	Jumlah kepemilikan akta kelahiran dalam (%)
2018	693	69,4
2019	700	70,00
2020	720	72,00
2021	950	95,14
2022	806	80,63



**Pelayanan 'MY DARLING' Penerbitan Akta Kelahiran**



Sumber data : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Berdasarkan grafik tersebut diatas, memperlihatkan bahwa kepemilikan akta mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Dengan mencermati hasil pengukuran dan evaluasi kinerja diatas bahwa kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan dapat dinilai berhasil mewujudkan seluruh sasaran yang ditargetkan dalam

tahun 2022, walaupun masih terdapat kegiatan yang belum optimal dan perlu dilakukan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan pada tahun yang akan datang.

**c. Prosentase Penerbitan Akte Kematian**

Jumlah kepemilikan akta kematian dihitung prosentase berdasarkan jumlah pemohon yang mengajukan Akte Kematian penduduk dengan penyelesaian dan diakhiri dengan Penerbitan akte Kematian bagi pemohon tersebut. Kepemilikan akta kematiann pada tahun 2022 sebesar 6.010 akta dari pengajuan pemohon sebanyak 6.010 berkas. Berdasarkan data tersebut prosentase kepemilikan Akta Kematian dari pengajuan akte kamatian sebesar 100 %. Capaian Ini telah memenuhi target yang ditetapkan pada tahun 2022 sebesar 90 %.. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk memiliki akta kematian dikarenakan akte kematian dibutuhkan untuk kepentingan pengurusan status bagi pasangan yang ditinggalkan, dana asuransi, dana ahli waris bagi keluarga yang ditinggalkan, dan lain sebagainya.. Adapun untuk data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Kewajiban Memiliki Akte Kematian di Kabupaten Pasuruan				
Tahun	Jumlah Penduduk ( orang )	Jumlah Pengajuan Akte Kematian	Jumlah Penerbitan Akte Kematian	Prosentase Penerbitan Akte Kematian
2021	1.603.550	11.129	11.129	100 %
2022	1.606.907	15.817	15.817	100 %

Sumber data :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Pencapaian Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2022 dapat dilihat pada lampiran Tabel 2.1 dan Tabel 2.1.A

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Kriteria penilaian yang diuraikan dalam tabel selanjutnya akan dipergunakan untuk mengukur kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk tahun 2022.

Kenaikan ataupun penurunan indikator merupakan bagian dari akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Pada tabel 2.2 yang akan disajikan terdapat satu indikator tujuan dan lima indikator sasaran. Pada indikator tujuan yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat ( IKM ) mengalami kenaikan target yang ditetapkan. Pada 2 ( dua ) ndikator sasaran yaitu persentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan dan penilaian nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mengalami kenaikan sehingga diproyeksikan pada tahun berikutnya juga mengalami kenaikan sedangkan komponen salah satu komponen IKK dari empat (4) IKK tersebut adalah persentase Kepemilikan KIA bagi anak yang berusia 0 tahun sd usia sebelum 17 tahun yang diproyeksikan pada tahun berikutnya mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Keberhasilan ini merupakan upaya berupa perbaikan pelayanan yang terus menerus diupayakan kepada seluruh Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada khususnya dan terhadap seluruh aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

Berikut ditampilkan tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan.

**Tabel T-C.30**  
**Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah**  
**Kabupaten Pasuruan**

No	Indikator	SPM/ Standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	<b>Tujuan :</b>											
1.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			89	90	91	92	89,89	N/A	91	92	Melebihi target
1.	<b>Sasaran :</b>											
1.	Prosentase Penduduk yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan		1.Prosentase Kepemilikan KTP EI	98,73%	98,82%	98,87%	99,10%	98,65%	N/A	98,87%	99,10%	Kurang memenuhi target
			2.Prosentase Kepemilikan KK	98%	99			98,10%	N/A			Melebihi target
			3.Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran	80%	82,5%	85%	87,5%	80,63%	N/A	85%	87,5%	Melebihi target
			4.Prosentase Kepemilikan KIA		30 %	35 %	40 %		N/A	35 %	40 %	
2.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			A (80,20)	A (81)	A (81,20)	A (81,40)	A (80,68)	N/A	A (81,20)	(81,40)	Melebihi target

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan dibidang kependudukan dan pencatatan sipil. Sedangkan untuk menyelenggarakan tugasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan mempunyai fungsi melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibidang kependudukan dan pencatatan sipil yang meliputi upaya peningkatan (promotif) dan upaya pencegahan (preventif).

Dari analisis perkembangan dan masalah pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana yang diuraikan di dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, maka isu strategis yang masih dihadapi oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan sampai dengan saat ini adalah :

- a. Program pelayanan administrasi kependudukan belum dapat menjangkau seluruh wilayah di Kabupaten Pasuruan karena ada beberapa kecamatan yang mengalami kesulitan jaringan.
- b. Semakin meningkatnya animo masyarakat akan pentingnya kepemilikan dokumen administrasi kependudukan, maka peran Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan perlu ditingkatkan dalam hal pelayanan kepada masyarakat.

Dari Uraian diatas maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan untuk Permasalahan berdasarkan analisa tersebut adalah :

1. Terbatasnya sarana dan Prasarana, seperti gedung pelayanan dangudang penyimpanan arsip yang kurang representif serta peralatan perekaman di 24 kecamatan yang butuh peremajaan.
2. Terbatasnya jumlah SDM sebagai tenaga/petugas entry pelayanan Administrasi Kependudukan di 24 kecamatan

3. Terbatasnya jaringan untuk mengakses data pelayanan Administrasi Kependudukan.
4. Kurangnya sarana mobilitas kendaraan dinas untuk pelayanan administrasi kependudukan di daerah terpencil / pegunungan.

## Matrik SWOT

Setelah mengidentifikasi kondisi internal dan eksternal yang dihadapi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, perubahan yang terjadi pada faktor eksternal akan berpengaruh terhadap peluang dan ancaman. Sedangkan perubahan yang terjadi pada faktor internal akan berpengaruh terhadap kekuatan dan kelemahan usaha yang dijalankan. Matrik faktor internal dan eksternal kemudian dituangkan dalam matrik SWOT untuk menentukan perencanaan strategis serta jenis strategi yang sesuai dengan kondisi usaha. Matrik SWOT dapat dilihat pada tabel berikut ini :

### MATRIK SWOT

<b>FAKTOR INTERNAL</b>	<b>Strength (S) :</b> 1. Struktur Organisasi dan Tugas Fungsi yg jelas 2. UU tentang Administrasi Kependudukan 3. Sarana dan Prasarana yang memadai	<b>Weakness (Kelemahan):</b> 1. Proses Penyelesaian Dokumen kependudukan yg lama (14 hari). 2. Terbatasnya jumlah dan kompetensi SDM 3. Faktor geografis wilayah Kabupaten Pasuruan
<b>FAKTOR EKSTERNAL</b>	<b>Strategi (SO) :</b> 1. Meningkatkan kinerja pelayanan dan aktif melaksanakan koord dg Kec. Dan desa /Kel serta memanfaatkan perkembangan teknologi IT 2. Menerapkan sistem jemput bola yakni dengan menyediakan sistem kader pada masing-masing wilayah 3. Pelatihan ISO kepada	<b>Strategi (WO)</b> 1. Meningkatkan kompetensi dan budaya kerja dengan pelatihan/pembinaan 2. Mempercepat proses penyelesaian dengan memanfaatkan teknologi modern. 3. Menerapkan aplikasi Adminduk dengan memanfaatkan teknologi informasi.
<b>Opportunities (O)</b> 1. Perkembangan teknologi informasi yg mempercepat pelayanan 2. Pemanfaatan dokumen kependudukan oleh instansi lain 3. Tersedianya anggaran APBN dari pusat		

	seluruh Pegawai Dispenduk dan Pencapil	
<b>Threats (T)</b> 1. Kurangnya aksesibilitas masyarakat dg tempat pelayanan 2. Rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan 3. Masih tersentralisasinya penyediaan blanko KTP-el	<b>Strategi (ST)</b> 1. Meningkatkan aksesibilitas masyarakat ke tempat pelayanan 2. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen administrasi kependudukan 3. Pelatihan ISO kepada seluruh Pegawai Dispenduk dan Pencapil	<b>Strategi (WT)</b> 1. Meningkatkan dan mengoptimalkan SDM yang ada dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan. 2. Menempatkan petugas Dispenduk dan Pencapil di masing – masing kecamatan.

#### 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Pada awal penyusunan RKPD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan memiliki 6 (enam) Program dan 31 Kegiatan, hal ini sama dengan pada saat analisis kebutuhan program dan kegiatan.

Pada penyusunan Renstra Tahun 2024-2026, telah dilakukan penyesuaian terhadap RPD Tahun 2024-2026, sehingga program pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan menjadi 5 (lima) program. sebagaimana Tabel 3.3.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Tahunan disusun melalui usulan masing-masing Bidang serta hasil kegiatan forum Organisasi Perangkat Daerah yang hasilnya dituangkan dalam Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan. Dalam menyusun Rencana Kerja tahun 2024, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan berpedoman pada Renstra Tahun 2024 - 2026.

Usulan program dan kegiatan hasil Musrenbang tahun 2024 secara spesifik dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan pada Rencana Kerja Tahun 2024 dituangkan ke dalam lampiran tabel 2.4.

Tabel T-C.32

Tabel 2.4 Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Pasuruan

Noo	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota</b>				
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Musrenbang Kecamatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Rejoso	Jumlah Peremajaan alat - alat perekaman E-KTP	Rp. 138.780.000,-	Musrenbang Kecamatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Grati	Jumlah Peremajaan alat - alat perekaman E-KTP	Rp. 138.780.000,-	Musrenbang Kecamatan
	Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pohjentrek	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 200.000.000,-	Musrenbang Kecamatan
2.	<b>Program Pendaftaran</b>				

	<b>Penduduk</b>				
	Kegiatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk				
	Sub Kegiatan Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Lembaga Sekolah SMP dan SMA	Jumlah Laporan Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Rp. 35.000.000,-	Musrembang Kecamatan
<b>N0o</b>	<b>Program / Kegiatan / Sub Kegiatan</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Besaran / Volume</b>	<b>Catatan</b>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kegiatan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kec Lumbang	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran penduduk	Rp. 25.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pendaftaran Penduduk	Kec Wonorejo	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pendaftaran penduduk	Rp. 25.000.000,-	Musrembang Kecamatan
3.	<b>Program Pencatatan Sipil</b>				
	Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				
	Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	24 Lembaga sekolah PAUD	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Rp. 50.000.000,-	Musrembang Kecamatan
	Sub kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Kec. Wonorejo	Jumlah Laporan hasil sosialisasi Pencatatan Sipil	Rp. 50.000.000,-	Musrembang Kecamatan

# **BAB III**

## **TUJUAN DAN SASARAN**

### **DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

#### **3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional**

Kebijakan merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pelaksanaan program/kegiatan guna kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah, dalam hal ini Tujuan dan sasaran RPD Tahun 2024 -2026 Kabupaten Pasuruan.

Kebijakan Satuan Kerja sedapat mungkin selaras dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten bahkan dengan kebijakan pemerintah pusat. Kebijakan(umum) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan adalah :

- a. Peningkatan kualitas SDM antara lain melalui pelatihan pengembangan SDM (Membangun Etos Kerja, Tim Work dan Motivasi Menuju Service Excellence) bekerjasamapihak ketiga yang kompeten.
- b. Memberikan pelayanan administrasi kependudukan sesuai dengan SOP.
- c. Menerapkan sistem pelayanan administrasi kependudukan (akta kelahiran, perkawinan, KTP dan KK melalui pelayanan terpadu (MPP /Mall Pelayanan Publik),Pelayanan di desa melalui E Kios PAK LADI di 24 Kecamatan, Jemput Bola di Desa-desa terpencil, Rumah Sakit, Penduduk rentan, OTI (Orang tanpa Identitas) di dinas Sosial, Pondok Pesantren, Sekolah-sekolah dan sebagainya.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja. Renstra

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berkewajiban memberikan dukungan dan ikut bertanggung jawab atas tercapainya tujuan Pemerintah Kabupaten yang sesuai dengan fungsi dan bidang kewenangannya.

Tujuan merupakan pernyataan – pernyataan tentang hal – hal yang yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi dalam beberapa tahun kedepan.

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran, maka perlu penyelarasan tujuan dan dan sasaran RPD tahun 2024 - 2026. Tujuan dari RPD Kabupaten Pasuruan 2024 – 2026 adalah pada tujuan 3 yaitu : Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang dinamis dan pelayanan prima berbasis teknologi informasi, dengan sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Untuk menjabarkan serta mewujudkan tujuan dan sasaran RPD, maka disusun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tujuan jangka menengah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan indikator kinerja yaitu Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### **3.3. Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Sasaran adalah suatu kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh instansi dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun kedepan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis yang akan dicapai secara nyata melalui penetapan kebijakan, program kegiatan dan sub kegiatan sehingga dapat memberi arah terhadap alokasi sumber daya yang telah dipercayakan kepada instansi yang bersangkutan. Perumusan Sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi atau kelompok sasaran yang dilayani.

Berdasarkan Tujuan Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 – 2026, maka ditetapkan **sasaran** Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 yaitu :

1. Meningkatnya Cakupan kepemilikan Dokumen Kependudukan, dengan indikator kinerja :
  - Prosentase penduduk yang memiliki dokumen kependudukan
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dengan indikator kinerja :
  - Nilai SAKIP Perangkat Daerah

**Tabel 3.2.**

**Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pasuruan Tahun 2024**

Tujuan/ Sasaran/ SPM/ IKK	Indikator Kinerja	Realisasi 2022	Proyeksi 2023	Target 2024
<b>Tujuan :</b>				
Meningkatnya Kepuasan Pelayanan kependudukan dan Pencatatan Sipil	Nilai Indeks kepuasan Masyarakat (IKM)	89	90	91
<b>Sasaran :</b>				
Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan	Prosentase Penduduk yang memiliki dokumen Kependudukan	91	92	93
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dispenduk Capil	80,69	81	81,20
<b>Indikator Kinerja Daerah :</b>	1. Prosentase Kepemilikan KTP EI	98,65%	98,82%	98,87%
	2. Prosentase Kepemilikan Akte Kelahiran	80,63%	82,5%	85%
	3. Prosentase Kepemilikan KIA		30 %	35 %
	4. Jumlah OPD yg telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	3,57%	5 %	7 %

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Program dan kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang merupakan program dan kegiatan pelayanan langsung ke masyarakat adalah Jumlah program sebanyak 5 program dengan 16 kegiatan dan 37 sub Kegiatan dengan dana DAU (Dana Alokasi Umum) dengan anggaran Rp.16.200.128.440,00 (Enam belas milyar dua ratus juta seratus dua puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah ). Adapun rencana program dan kegiatan Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

#### **a. Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota**

1. Perencanaan, Penganggaran dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
  1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
  2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
  2. Sub Kegiatan Penyediaan administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
  3. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi listrik / Penerangan Bangunan kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
  2. Sub Kegiatan Penyediaan bahan logistik kantor
  4. Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
  5. Sub Kegiatan Penyediaan bahan /material
  6. Sub Kegiatan Fasilitasi kunjungan tamu
  7. Sub Kegiatan Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Sub Kegiatan Pengadaan kendaraan dinas / operasional lainnya
2. Sub Kegiatan Pengadaan Mebeler
3. Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
  2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
  1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
  2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya.

**b. Program Pendaftaran Penduduk**

1. Pelayanan Pendaftaran Penduduk
  - a. Sub Kegiatan Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan
  - b. Sub Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
2. Penataan Pendaftaran Penduduk
  - a. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan
3. Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pendaftaran penduduk
4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk

**c. Program Pencatatan Sipil**

1. Pelayanan Pencatatan Sipil
  - a. Sub Kegiatan Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil
  - b. Sub Kegiatan Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan
2. Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan sipil.
  - a. Sub Kegiatan Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil
  - b. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil
3. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil
  - a. Sub Kegiatan Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.

**d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

1. Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan
  - a. Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
  - b. Sub Kegiatan Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan
2. Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - a. Sub Kegiatan Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - b. Sub Kegiatan Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan
  - c. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan
  - d. Sub Kegiatan Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

- a. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan.

**e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan**

1. Penyusunan Profil Kependudukan
  - a. Sub Kegiatan Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota
  - b. Sub Kegiatan Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain

## **BAB IV**

# **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

### **4.1. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DISPENDUK CAPII**

Sesuai tugas dan fungsinya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, program dan kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Pasuruan sebagai berikut :

**a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :**

**1) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**

**1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan**

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dalam dokumen perencanaan adalah sub kegiatan yang mendukung pelaksanaan forum PERANGKAT DAERAH di lingkungan stake holder terkait untuk penyusunan rencana program dan pelaporan tahun yang akan datang dengan mengundang peserta sebanyak 80 orang.

**1.2 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah**

Sub kegiatan ini untuk mendukung penyusunan Dokumen SAKIP dan laporan evaluasi hasil renja Perangkat Daerah

**2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**

**2.1 Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN**

Penyediaan gaji dan tunjangan ASN untuk ASN Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan obyektif berdasarkan beban kerja dan prestasi kerja dengan jumlah ASN sebanyak 55 orang ASN.

## **2.2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN**

Penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN untuk mendukung honorarium Tenaga Harian lepas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertugas di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil serta THL yang tersebar di 24 Kantor Dispenduk Capil dan Kecamatan sebanyak 78 orang selama 13 bulan.

## **2.3. Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD**

Pelaksanaan Penatausahaan dan pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD adalah untuk pembayaran honorarium Pengelola Anggaran, PPK, PP, PPTK , Bendahara dan pengelola keuangan selama 12 bulan.

## **3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**

### **3.1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi.**

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi sebagai Dinas pelayanan kepada masyarakat dan pengelola data base SIAK terpusat.

## **4) Administrasi Umum Perangkat Daerah**

### **4.1. Penyediaan Komponen Instalasi listrik /Penerangan Bangunan Kantor.**

### **4.2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor**

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor untuk mendukung tertib administrasi umum

### **4.3. Penyediaan bahan logistik kantor**

Penyediaan alat – alat kebersihan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 24 kecamatan selama 12 bulan

#### 4.4. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

Penyediaan barang cetakan untuk keperluan operasional kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama 12 bulan

#### 4.5. Penyediaan bahan /material

Penyediaan peralatan sarana dan prasarana kantor untuk penunjang pelayanan berupa barang inventaris atau asset daerah.

#### 4.6. Fasilitasi kunjungan tamu

Penyediaan makan dan minum tamu kunjungan ke kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

#### 4.7. Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Penyediaan rapat – rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah untuk mendukung kegiatan perjalanan dinas luar daerah selama 12 bulan

### 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

#### 5.1. Pengadaan kendaraan dinas / operasional lainnya

Pemenuhan pengadaan kendaraan dinas untuk operasional pelayanan Jemput Bola, perekaman EKTP, kenduren Mas dan sebagainya dengan target 8 unit R2 dan 3 unit R4.

#### 5.2. Pengadaan Mebeler

Pemenuhan Pengadaan Mebeleur untuk mendukung sarana dan prasarana operasional / pelayanan dan kenyamanan dalam bekerja.

#### 5.3. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Pemenuhan Pengadaan sarana berupa peremajaan peralatan alat perekaman di 18 Kecamatan untuk mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat di 24 kecamatan.

### 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

#### 5.1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Pemenuhan jasa kirim dokumen administrasi kependudukan di 24 kecamatan melalui kerjasama dengan PT Pos Indonesia

#### 5.2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan listrik untuk mendukung kelancaran dan tertib administrasi umum dengan target 3 rek air, 7 Rekening telpon dan 24 rekening listrik, 2 rek internet, dan penyediaan surat kabar selama 12 bulan

**5.3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor**

Penyediaan jasa pelayanan umum perkantoran di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di rasi dan 24 kecamatan

**6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**

**6.1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Pemenuhan pemeliharaan kendaraan Dinas /Operasional baik untuk roda empat maupun roda dua sebanyak 12 unit dan BBM dengan target 12 bulan**

**6.2. Pemeliharaan Mebel**

Pemenuhan pemeliharaan mebel di di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di rasi dan 24 kecamatan,

**6.3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.**

**b. Program Pendaftaran Penduduk dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :**

**1) Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

**1.1. Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan**

Sub kegiatan ini untuk mendata bagi warga yang tidak memiliki data kependudukan (OTI/ Orang tanpa identitas) dan mendata WNA dan WNI

**1.2. Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk**

Peningkatan berupa layanan jemput bola ke desa-desa terpencil, sekolah-sekolah PAUD, SD maupun SMP maupun RSUD, Dinas sosial dan instansi terkait

**2). Penataan Pendaftaran Penduduk**

**2.1. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan**

**Pengadaan formulir pengajuan blangko KIA, Plastik dll.**

**3). Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

**3.1. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pendaftaran Penduduk**

**4. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk**

**4.1. Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk**

**Pembinaan dan monitoring dan evaluasi ke e Kios Pak Ladi dan pelayanan jemput bola ke daerah yang belum terjangkau pelayanan.**

**c. Program Pencatatan Sipil dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :**

**1) Pelayanan Pencatatan Sipil**

**1.1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil**

**Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil untuk mendukung peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan melalui pendaftaran penduduk**

**1.2. Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-EI, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan**

**Pengadaan formulir pengajuan akte kelahiran, Kematian, Perkawinan, plastik Akte kelahiran, kematian, perkawinan dan lain sebagainya untuk mendukung pelayanan kepada masyarakat.**

**2). Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

**2.1. Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan lembaga Non Pemerintah di Kabupaten /Kota dalam Penertiban Pelayanan pencatatan sipil.**

**2.2. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil**

Pelayanan jemput bola dan monitoring pelayanan kios E Pak Ladi di 24 kecamatan

**2.3. Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil**

Sosialisasi terkait Akte Pencatatan Sipil kepada Tokoh Masyarakat, Organisasi Masyarakat, lembaga sekolah dan masyarakat umum lainnya di 8 kecamatan.

**3). Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil**

**3.1. Pembinaan dan pengawasan terkait pencatatan sipil.**

Kegiatan dan pengawasan terkait pelayanan pencatatan sipil di 24 kecamatan.

**d. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :**

**1) Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan**

**1.1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan**

**1.2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan**

Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan sub kegiatan ini mengadakan kerjasama lintas sektoral dengan 4 PERANGKAT DAERAH terkait

**2) Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

**2.1. Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pelayanan jemput bola dan monitoring pelayanan kios E Pak Ladi di 24 kecamatan

**2.2. Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan**

Pemenuhan kebutuhan operasional 24 kecamatan sebanyak 24 paket per tahun

**2.3. Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan**

Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam pemanfaatan data

administrasi Kependudukan dengan mengadakan PKS (Perjanjian Kerjasama)

2.4. Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Sosialisasi kepada petugas E Kios PAK LADI di 24 Kecamatan.

3). Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

3.1. Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan data kependudukan.

Kegiatan Bimbingan teknis (Bimtek) kepada operator petugas layanan E Pak Ladi di 260 desa yang tersebar di 24 kecamatan selama 3 hari.

**e. Program Pengelolaan Profil Kependudukan dengan kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :**

1) Penyusunan Profil Kependudukan

1.1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota

Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota untuk mendukung penyediaan data kependudukan yang bisa di akses oleh masyarakat dengan target 24 kecamatan

1.2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain

Untuk mendukung penyusunan profil dan data Kependudukan selama 1 tahun.

Adapun Rumusan Pendanaan Rencana Program dan Kegiatan tahun dan Prakiraan maju tahun 2023 Kabupaten Pasuruan dapat dilihat pada tabel 4.1

Tabel TC 31  
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2024  
Kabupaten Pasuruan

Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.12.01	<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah</b>	100%	14,135,311,940.00	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		<b>Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah</b>	100%	14,160,311,940.00	
2.12.01.2.01	<b>1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan laporan kinerja PD	2 dokumen	229,794,940.00	<b>1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Dispenduk dan Pencapil	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan laporan kinerja PD	2 dokumen	229,794,940.00	
2.12.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	30,000,000.00	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	30,000,000.00	
2.12.01.2.01.07	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	199,794,940.00	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	199,794,940.00	
2.12.01.2.02	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Dispenduk dan Pencapil	Persentase Capaian administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	3 Dokumen	8,835,517,000.00	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		Persentase Capaian administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	3 Dokumen	8,835,517,000.00	
2.12.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 ASN	6,970,517,000.00	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 ASN	6,970,517,000.00	
2.12.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	79 THL	1,750,000,000.00	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	79 THL	1,750,000,000.00	
2.12.01.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	11 dokumen	115,000,000.00	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	11 dokumen	115,000,000.00	
2.12.01.2.05	<b>3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Dispenduk dan Pencapil	Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	4 Layanan	125,000,000.00	<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Terlaksananya administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	4 Layanan	6,645,000,000.00	
2.12.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	125,000,000.00	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	1,750,000,000.00	
2.12.01.2.06	<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 layanan	2,595,000,000.00	<b>4 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah	4 layanan	2,745,000,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.12.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	50,000,000.00	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	1,750,000,000.00	
2.12.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	35 jenis barang	1,750,000,000.00	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 jenis barang	200,000,000.00	
2.12.01.2.06.02	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	200,000,000.00	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	200,000,000.00	
2.12.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50,000,000.00	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50,000,000.00	
2.12.01.2.06.07	5 Penyediaan Bahan / Material	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	10 Paket	100,000,000.00	5 Penyediaan Bahan / Material	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	10 Paket	100,000,000.00	
2.12.01.2.06.08	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	200 Orang	45,000,000.00	6 Fasilitas Kunjungan Tamu	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu	200 Orang	45,000,000.00	
2.12.01.2.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan	100 laporan	400,000,000.00	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi	100 laporan	400,000,000.00	
2.12.01.2.07	<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	30 jenis	<b>1,400,000,000.00</b>	<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	30 jenis	<b>1,400,000,000.00</b>	
2.12.01.2.07.02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 Jenis	500,000,000.00	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 Jenis	500,000,000.00	
2.12.01.2.07.05	2 Pengadaan Mebel	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 paket	100,000,000.00	2 Pengadaan Mebel	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 paket	100,000,000.00	
2.12.01.2.07.07	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	60 Unit	800,000,000.00	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	60 Unit	800,000,000.00	
2.12.01.2.08	<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	<b>335,000,000.00</b>	<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3 Jenis	<b>335,000,000.00</b>	
2.12.01.2.08.01	1 Penyediaan Surat Menyurat	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	45,000,000.00	1 Penyediaan Surat Menyurat	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	45,000,000.00	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.12.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik yang disediakan	35 laporan	275,000,000.00	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik yang disediakan	35 laporan	275,000,000.00	
2.12.01.2.08.04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 laporan	15,000,000.00	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 laporan	15,000,000.00	
2.12.01.2.09	<b>7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	<b>615,000,000.00</b>	<b>7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	3 Jenis	<b>615,000,000.00</b>	
2.12.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 jenis	350,000,000.00	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 jenis	350,000,000.00	
2.12.01.2.09.05	2 Pemeliharaan Mebel	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	0.00	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	0.00	
2.12.01.2.09.06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	150,000,000.00	2 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	150,000,000.00	
2.12.01.2.09.09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 unit	115,000,000.00	3 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 unit	115,000,000.00	
2.12.02	<b>II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Kependudukan	97,50 %	<b>700,000,000.00</b>	<b>II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>		Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran Kependudukan	97,50 %	<b>700,000,000.00</b>	
2.12.02.2.01	<b>1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	<b>150,000,000.00</b>	<b>1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>		Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	<b>150,000,000.00</b>	
2.12.02.2.01.01	1 Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1000 dokumen	75,000,000.00	1 Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1000 dokumen	75,000,000.00	

Kode	Rancangan Awal RIKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.12.02.2.01.04	2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	24 Laporan	75,000,000.00	2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	24 Laporan	75,000,000.00	
2.12.02.2.02	<b>2 Penataan Pendaftaran Penduduk</b>		Jumlah Laporan hasil Penataan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	<b>400,000,000.00</b>	<b>2 Penataan Pendaftaran Penduduk</b>		Jumlah Laporan hasil Penataan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	<b>400,000,000.00</b>	
2.12.02.2.02.02	1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Blangko KIA	400,000,000.00	1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-EI, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Blangko KIA	400,000,000.00	
2.12.02.2.04	<b>4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	24 Laporan	<b>150,000,000.00</b>	<b>4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan	24 Laporan	<b>150,000,000.00</b>	
2.12.02.2.04.02	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan	24 Laporan	150,000,000.00	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan terkait pendaftaran penduduk	24 Laporan	150,000,000.00	
2.12.03	<b>III PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase cakupan kepemilikan dokumen akte Kelahiran</b>	<b>85%</b>	<b>499,816,500.00</b>	<b>III PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>		<b>Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	<b>85%</b>	<b>499,816,500.00</b>	
2.12.03.2.01	<b>1 Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85%	200,000,000.00	<b>1 Pelayanan Pencatatan Sipil</b>		Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85%	200,000,000.00	
2.12.03.2.01.02	1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	24 Layanan	125,000,000.00	1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	24 Layanan	125,000,000.00	
2.12.03.2.01.05	2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Sampul Plastik	75,000,000.00	2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan		Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Sampul Plastik	75,000,000.00	
2.12.03.2.02	<b>2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		<b>Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling</b>	2400 Dokumen	<b>249,316,500.00</b>	<b>2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		<b>Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling</b>	2400 Dokumen	<b>249,316,500.00</b>	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(4)	(10)	(6)	(12)
2.12.03.2.02.04	1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait	1.200 akta	99,316,500.00	1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	1.200 akta	99,316,500.00	
2.12.03.2.02.08	2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 Laporan	150,000,000.00	2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 Laporan	150,000,000.00	
2.12.03.2.03	<b>2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan</b>		<b>Jumlah laporan hasil pembinaan dan penyelenggaraan</b>	<b>24 kecamatan</b>	<b>50,500,000.00</b>	<b>2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		<b>peningkatan kualitas pelayanan</b>	24 kecamatan	<b>50,500,000.00</b>	
2.12.03.2.03.02	1 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	24 laporan	50,500,000.00	1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil		Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	24 laporan	50,500,000.00	
2.12.04	<b>IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>650,000,000.00</b>	<b>IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>		<b>Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten</b>	100%	<b>750,000,000.00</b>	
2.12.04.2.01	<b>1 Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>		<b>Jumlah laporan penyajian database kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan</b>	<b>12 Laporan</b>	<b>150,000,000.00</b>	<b>1 Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>		<b>Jumlah laporan penyajian database kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan</b>	12 Laporan	<b>150,000,000.00</b>	
2.12.03.2.01.01	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	365 desa	50,000,000.00	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	365 desa	50,000,000.00	
2.12.03.2.01.02	2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan	10 MOU	100,000,000.00	2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan	10 MOU	100,000,000.00	
2.12.04.2.03	<b>2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	<b>25 Laporan</b>	<b>350,000,000.00</b>	<b>2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Jumlah Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan</b>	25 Laporan	<b>450,000,000.00</b>	

Kode	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2.12.04.2.03.03	1 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10 Laporan	250,000,000.00	2 Fasilitas terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah laporan hasil fasilitas pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10 Laporan	250,000,000.00	
2.12.04.2.03.04	2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	50,000,000.00	3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	50,000,000.00	
2.12.04.2.03.05	3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait PIAK	6 Laporan	50,000,000.00	3 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan		Jumlah laporan hasil sosialisasi terkait PIAK	6 Laporan	150,000,000.00	
2.12.04.2.04	3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi	3 laporan	150,000,000.00	3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	150,000,000.00	
2.12.04.2.04.03	1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	3 laporan	150,000,000.00	1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	3 laporan	150,000,000.00	
2.12.05.2.01	V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Ketersediaan Data Base yang terakreditasi	100%	215,000,000.00	V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		Ketersediaan Data Base yang terakreditasi	100%	215,000,000.00	
2.12.05.2.01	I Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah buku profil Kependudukan yang disusun	56 Buku	215,000,000.00	1 Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah buku profil Kependudukan yang disusun	56 Buku	215,000,000.00	
2.12.05.2.01.01	1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	24 paket	65,000,000.00	1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	24 paket	65,000,000.00	
2.12.05.2.01.02	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	56 Buku	150,000,000.00	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	56 Buku	150,000,000.00	
	<b>JUMLAH</b>				<b>16,200,128,440.00</b>					<b>16,325,128,440.00</b>	

Tabel 2.1.A  
Analisis Kinerja Pencapaian Renstra 2018-2023 sampai dengan Tahun 2023

No.	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan	Capaian Renstra s/d Tahun 2023	Faktor Penyebab	Rencana Tindak Lanjut
A	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	100%		
1	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat</i>	100%		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%		
	Evaluasi Kinerja Perangkat	100%		
2	<i>Administrasi Keuangan Perangkat</i>	100%		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	100%		
	Penyediaan Administrasi	100%		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%		
3	<i>Administrasi Umum Perangkat</i>	100%		
	Penyediaan Peralatan dan	100%		
	Penyediaan Bahan Logistik	100%		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100%		
	Penyediaan Bahan /Material			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%		

4	<i>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	100%		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			
	Pengadaan Mebel	100%		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100%		
5	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100%		
6	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	100%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100%		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100%		
B	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	90%	Masih belum terpenuhinya kebutuhan blangko KIA untuk anak dibawah usia 17 Tahun karena keterbatasan anggaran	Koordinasi dan pengusulan kebutuhan anggaran untuk memenuhi target Nasional

1	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	100%		
	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	100%	Kondisi blangko E KTP yang mengalami kekurangan langka menyebabkan pencetakan Bio Data sebagai pengganti blangko E KTP	Pengusulan cetak Blangko E KTP dengan menggunakan dana hibah dari DBHCHT atau pajak Rokok.
2	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>	100%		
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP el, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk sesuai dengan kebutuhan	100%		
3	<i>pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	100%		
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pendaftaran Penduduk	100%		
C	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	100%		
1	<i>Pelayanan Pencatatan Sipil</i>	100%		
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	80%	Kepemilikan Akte Pencatatan Sipil/Kelahiran belum memenuhi target yang telah ditetapkan karena keterbatasan anggaran dan kendaraan operasional	Pelayanan Permohonan Akte Pencatatan Sipil perlu lebih ditingkatkan dengan pelayanan secara jemput bola ke daerah/desa sulit jangkauan jaringan, lembaga sekolah PAUD, TK, dan SMP.
2	<i>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</i>	100%		
	Pelayanan Secara Aktif Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	100%		

	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	100%		
D	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	100%		
1	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	100%		
	Pengolahan Penyajian Data Kependudukan	100%		
2	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	100%		
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%		
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%		
E	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	100%		
	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	100%		
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	100%		
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain	100%		

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023  
Kabupaten Pasuruan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program / Kegiatan / Sub Kegiatan (Renstra PD) Tahun 2023 (Kondisi Akhir)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun 2023	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2023	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1		3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
503	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN									
50301	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB/KOTA	Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	81.00	80.68	80.10	80.68	100%	81.00	81.00	100%
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan laporan kinerja PD	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok	100%	2 dok	2 dok	100%
	Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dok	5 dok	5 dok	5 dok	100%	5 dok	5 dok	100%
	Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 lap	7 lap	7 lap	7 lap	100%	7 lap	7 lap	100%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian administrasi keuangan PD yang dilaksanakan	3 dok	3 dok	3 dok	3 dok	100%	3 dok	3 dok	100%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 org/bln	52 org/bln	52 org/bln	52 org/bln	100%	52 org/bln	52 org/bln	100%

	<b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>									
	<b>BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>									
	<b>PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Prosentase kepemilikan dokumen kependudukan	98.35%	98.25%	98%	98.25%	100%	98.35%	98.35%	100%
	<i>Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk</i>	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
	Pendataan Penduduk Non Permanen dan rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%	1000 Dokumen	1000 Dokumen	100%
	<i>Penataan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Laporan hasil Penataan Pendaftaran Penduduk</i>	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir dan buku terkait	39000 Blangko KIA	39000 Blangko KIA	39000 Blangko KIA	39000 Blangko KIA	100%	39000 Blangko KIA	39000 Blangko KIA	100%
	<i>Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</i>	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan</i>	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
	Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	100%	24 Laporan	24 Laporan	100%
	<b>PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Persentase kepemilikan akta kelahiran	85%	80.63%	80%	80.63%	100%	85%	85%	100%

	<b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan</i>	Jumlah laporan penyajian database kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	365 desa	365 desa	365 desa	365 desa	100%	365 desa	365 desa	100%
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan	10 MOU	10 MOU	10 MOU	10 MOU	100%	10 MOU	10 MOU	100%
	<i>Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</i>	Jumlah Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	25 Laporan	100%	25 Laporan	25 Laporan	100%
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pengelolaan Informasi Administrasi	10 Paket'	10 Paket'	10 Paket'	10 Paket'	100%	10 Paket'	10 Paket'	100%
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%

	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%
	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%
	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Ketersediaan Data Base yang terkalifikasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>Penyusunan Profil Kependudukan</i>	Jumlah buku profil Kependudukan yang disusun	56 Buku	56 Buku	56 Buku	56 Buku	100%	56 Buku	56 Buku	100%
	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	24 paket	24 paket	24 paket	24 paket	100%	24 paket	24 paket	100%
	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	56 Buku	56 Buku	56 Buku	56 Buku	100%	56 Buku	56 Buku	100%

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah</b>	30 jenis	30 jenis	30 jenis	30 jenis	100%	1 jenis	1 jenis	100%
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	10 Jenis	100%	10 Jenis	10 Jenis	100%
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	2 Laporan	100%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik yang disediakan	35 lap	35 lap	35 lap	35 lap	100%	35 lap	35 lap	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	100%	10 Laporan	10 Laporan	100%
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	3 jenis	3 jenis	3 jenis	3 jenis	100%	3 jenis	3 jenis	100%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 jenis	16 jenis	16 jenis	16 jenis	100%	16 jenis	16 jenis	100%
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	200 unit	200 unit	200 unit	100%	200 unit	200 unit	100%
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 unit	5 unit	5 unit	5 unit	100%	5 unit	5 unit	100%

	<b>Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	<b>Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil</b>	85%	80.63%	80%	80.63%	100%	85%	85%	100%
	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	24 Layanan	100%	24 Layanan	24 Layanan	100%
	Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blangko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Jumlah dokumen kependudukan selain blangko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Sampul Plastik	39000 Sampul Plastik	39000 Sampul Plastik	39000 Sampul Plastik	100%	39000 Sampul Plastik	39000 Sampul Plastik	100%
	<b>Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling	2400 Dokumen	2400 Dokumen	2400 Dokumen	2400 Dokumen	100%	2400 Dokumen	2400 Dokumen	100%
	Koordinasi Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil koordinasi antar lembaga pemerintah / lembaga non pemerintah di kabupaten / kota dalam penertiban	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	1.200 akta	1.200 akta	1.200 akta	1.200 akta	100%	1.200 akta	1.200 akta	100%
	Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	12 Laporan	100%

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	79 org/bln	79 org/bln	79 org/bln	79 org/bln	100%	79 org/bln	79 org/bln	100%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	11 dok	11 dok	11 dok	11 dok	100%	11 dok	11 dok	100%
<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	4 layanan	4 layanan	4 layanan	4 layanan	100%	4 layanan	4 layanan	100%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang di sediakan	6 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	100%	6 Paket	6 Paket	100%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 jenis barang	35 jenis barang	35 jenis barang	35 jenis barang	100%	35 jenis barang	35 jenis barang	100%
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	40 Paket	40 Paket	40 Paket	100%	40 Paket	40 Paket	100%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10 Paket	10 Paket	10 Paket	10 Paket	100%	10 Paket	10 Paket	100%
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	15 Paket	15 Paket	15 Paket	15 Paket	100%	15 Paket	15 Paket	100%
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	200 Orang	200 Orang	200 Orang	200 Orang	100%	200 Orang	200 Orang	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100 laporan	100%	100 laporan	100 laporan	100%

**Tabel 3.3**  
**Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

**Nama Perangkat Daerah : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Meningkatnya kepuasan pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	2.12.01	<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN / KOTA</b>		Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah	100%	14,135,311,940.00
		2.12.01.2.01	<b>1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan laporan kinerja PD</b>	2 dokumen	229,794,940.00
		2.12.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	5 dokumen	30,000,000.00
		2.12.01.2.01.07	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	7 laporan	199,794,940.00
		2.12.01.2.02	<b>2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Capaian administrasi keuangan PD yang dilaksanakan</b>	3 Dokumen	8,835,517,000.00
		2.12.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	52 ASN	6,970,517,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	79 THL	1,750,000,000.00
		2.12.01.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	11 dokumen	115,000,000.00
		2.12.01.2.05	<b>3 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	4 Layanan	<b>125,000,000.00</b>
		2.12.01.2.05.09	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi		Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12 orang	125,000,000.00
		2.12.01.2.06	<b>3 Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Persentase Pemenuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	4 layanan	<b>2,595,000,000.00</b>
		2.12.01.2.06.01	1 Penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang disediakan	6 paket	50,000,000.00
		2.12.01.2.06.02	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	35 jenis barang	1,750,000,000.00
		2.12.01.2.06.04	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	40 Paket	200,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 paket	50,000,000.00
		2.12.01.2.06.07	5 Penyediaan Bahan / Material	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket bahan / material yang disediakan	10 Paket	100,000,000.00
		2.12.01.2.06.08	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	200 Orang	45,000,000.00
		2.12.01.2.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100 laporan	400,000,000.00
		2.12.01.2.07	<b>5 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah	30 jenis	<b>1,400,000,000.00</b>
		2.12.01.2.07.02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional atau Lapangan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	10 Jenis	500,000,000.00
		2.12.01.2.07.05	2 Pengadaan Mebel	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah paket mebel yang disediakan	35 paket	100,000,000.00
		2.12.01.2.07.07	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	60 Unit	800,000,000.00
		2.12.01.2.08	<b>6 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	3 Jenis	<b>335,000,000.00</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.01.2.08.01	1 Penyediaan Surat Menyurat	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	2 Laporan	45,000,000.00
		2.12.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi SDA dan listrik yang disediakan	35 laporan	275,000,000.00
		2.12.01.2.08.04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	10 laporan	15,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.01.2.09	<b>7 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	3 Jenis	<b>615,000,000.00</b>
		2.12.01.2.09.02	1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	16 jenis	350,000,000.00
		2.12.01.2.09.05	2 Pemeliharaan Mebel	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah mebel yang dipelihara	35 unit	0.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.01.2.09.06	3 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	200 unit	150,000,000.00
		2.12.01.2.09.09	4 Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara / direhabilitasi	5 unit	115,000,000.00
	Meningkatnya Kepuasan Pelayanan Kependudukan dan Pelayanan Sipil	2.12.02	<b>II PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK</b>	Dispenduk dan Pencapil	<b>Persentase cakupan kepemilikan dokumen Pendaftaran kependudukan</b>	<b>97,50 %</b>	<b>700,000,000.00</b>
		2.12.02.2.01	<b>1 Pelayanan Pendaftaran Penduduk</b>	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	150,000,000.00
		2.12.02.2.01.01	1 Pendataan Penduduk non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen hasil pendataan penduduk non permanen dan rentan administrasi kependudukan	1000 dokumen	75,000,000.00
		2.12.02.2.01.04	2 Peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	24 Laporan	75,000,000.00
		2.12.02.2.02	<b>2 Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan hasil Penataan Pendaftaran Penduduk	24 Laporan	400,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKP				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.02.2.02.02	1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Blanko KIA	400,000,000.00
		2.12.02.2.04	<b>4 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	Dispenduk dan Pencapil	<i>Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan</i>	24 Laporan	<b>150,000,000.00</b>
		2.12.02.2.04.02	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan pembinaan dan pengawasan	24 Laporan	150,000,000.00
		<b>2.12.03</b>	<b>III PROGRAM PENCATATAN SIPIL</b>	Dispenduk dan Pencapil	<b>Persentase cakupan kepemilikan dokumen akte Kelahiran</b>	<b>85%</b>	<b>499,816,500.00</b>
		2.12.03.2.01	<b>1 Pelayanan Pencatatan Sipil</b>	Dispenduk dan Pencapil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil	85%	<b>200,000,000.00</b>
		2.12.03.2.01.02	1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	24 Layanan	125,000,000.00
		2.12.03.2.01.05	2 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan Buku terkait Pencatatan Sipil sesuai dengan Kebutuhan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen kependudukan selain blanko KTP el, formulir, dan buku terkait pencatatan sipil sesuai dengan kebutuhan yang tersedia	39000 Sampul Plastik	75,000,000.00

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.03.2.02	<b>2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>	Dispenduk dan Pencapil	Capaian kepemilikan dokumen pencatatan sipil secara keliling	<b>2400 Dokumen</b>	<b>249,316,500.00</b>
		2.12.03.2.02.04	1 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	1.200 akta	99,316,500.00
		2.12.03.2.02.08	2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	12 Laporan	150,000,000.00
		2.12.03.2.03	<b>2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil</b>		Jumlah laporan hasil pembinaan dan penyelenggaraan yang telah dilakukan	<b>24 kecamatan</b>	<b>50,500,000.00</b>
		2.12.03.2.03.02	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan	24 laporan	50,500,000.00
		2.12.04	<b>IV PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>	Dispenduk dan Pencapil	<b>Persentase penyediaan database kependudukan dan pencapil di tingkat Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>650,000,000.00</b>
		2.12.04.2.01	<b>1 Pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan dan penyajian database kependudukan</b>	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan penyajian database kependudukan dan kerjasama pemanfaatan data kependudukan	12 Laporan	<b>150,000,000.00</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKPD				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.03.2.01.01	1 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang diolah dan disajikan	365 desa	50,000,000.00
		2.12.03.2.01.02	2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan	10 MOU	100,000,000.00
		<b>2.12.04.2.03</b>	<b>2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Dispenduk dan Pencapil	<i>Jumlah Penyelenggaraan dan pemeliharaan jaringan sarana dan prasarana pengelolaan informasi administrasi kependudukan</i>	25 Laporan	<b>350,000,000.00</b>
		2.12.04.2.03.03	1 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah laporan hasil fasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan	10 Laporan	250,000,000.00
		2.12.04.2.03.04	2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan	5 Dokumen	50,000,000.00
		2.12.04.2.03.05	3 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Kependudukan	6 Laporan	50,000,000.00
		2.12.04.2.04	<b>3 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	3 laporan	<b>150,000,000.00</b>

Tujuan	Sasaran	Kode	Rancangan Awal RKP				
			Program / Kegiatan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)
(1)		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		2.12.04.2.04.03	1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah Laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	3 laporan	150,000,000.00
		2.12.05.2.01	<b>V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	Dispenduk dan Pencapil	<b>Ketersediaan Data Base yang terkalstifikasi</b>	<b>100%</b>	<b>215,000,000.00</b>
		2.12.05.2.01	<b>I Penyusunan Profil Kependudukan</b>	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah buku profil Kependudukan yang disusun	56 Buku	215,000,000.00
		2.12.05.2.01.01	1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	24 paket	65,000,000.00
		2.12.05.2.01.02	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dispenduk dan Pencapil	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	56 Buku	150,000,000.00
			<b>JUMLAH</b>				<b>16,200,128,440.00</b>

Tabel TC.33

Tabel 4.1. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025  
Kabupaten Pasuruan

Nama OPD : DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH	Persentase Pemenuhan Penunjang Urusan Pemerintah	Dispenduk dan Pencapil	100%	14,135,311,940.00	APBD		100%	14,609,794,940.00
2.12.01.2.01	1 Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan laporan kinerja PD	Dispenduk dan Pencapil	100%	229,794,940	DAU		100%	329,794,940
2.12.01.2.01.01	1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	80 peserta	<b>Dana</b> 30,000,000 a. Belanja Operasi : 30,000,000 Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : 30,000,000 Belanja Bunga : Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		80 peserta	50,000,000 50,000,000 50,000,000
2.12.01.2.01.07	2 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Dispenduk dan Pencapil	130 Orang	<b>Dana</b> 199,794,940 a. Belanja Operasi : 199,794,940 Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : 199,794,940 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU		130 Orang	179,794,940 179,794,940 179,794,940
2.12.01.2.02	2 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	s	Dispenduk dan Pencapil	100%	8,835,517,000	DAU		100%	9,240,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.02.01	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Dispenduk dan Pencapil	52 ASN	<b>Dana</b> <b>6.970.517,000</b>	DAU		52 ASN	7.200.000,000
					a. Belanja Operasi : 6,970,517,000			7.200.000,000	
					- Belanja Pegawai : 6,970,517,000			7.200.000,000	
					Belanja barang & jasa :				
					Belanja Bunga :				
					Belanja Subsidi :				
					Belanja Hibah :				
					Belanja Bantuan :				
					b. Belanja Modal :				
					c. Belanja Tidak Terduga :				
					d. Belanja Transfer :				
2.12.01.2.02.02	2 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah dokumen hasil penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dispenduk dan Pencapil	78 THL	<b>Dana</b> <b>1.750.000,000</b>	DAU		78 THL	1.920.000,000
					a. Belanja Operasi : 1,750,000,000			1.920.000,000	
					Belanja Pegawai :			1.920.000,000	
					Belanja barang & jasa : 1,750,000,000			1.920.000,000	
					Belanja Bunga :				
					Belanja Subsidi :				
					Belanja Hibah :				
					Belanja Bantuan :				
					b. Belanja Modal :				
					c. Belanja Tidak Terduga :				
					d. Belanja Transfer :				
2.12.01.2.02.03	3 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah dokumen penatausahaan dan pengujian / verifikasi keuangan SKPD	Dispenduk dan Pencapil	20 Orang	<b>Dana</b> <b>115.000,000</b>	DAU		20 Orang	120.000,000
					a. Belanja Operasi : 115,000,000			120.000,000	
					Belanja Pegawai :			120.000,000	
					Belanja barang & jasa : 115,000,000			120.000,000	
					Belanja Bunga :				
					Belanja Subsidi :				
					Belanja Hibah :				
					Belanja Bantuan :				
					b. Belanja Modal :				
					c. Belanja Tidak Terduga :				
					d. Belanja Transfer :				
2.12.01.2.05	4 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase terpenuhinya Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat	Dispenduk dan Pencapil	100%	<b>125.000.000,00</b>	DAU		100%	<b>140.000.000,00</b>

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.02	1 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		130 Orang	<b>Dana</b> <u>125,000,000</u>  a. Belanja Operasi : 125,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 125,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		130 Orang	<u>140,000,000</u>  140,000,000  140,000,000
2.12.01.2.06	4 Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	<u>2,595,000,000.00</u>	DAU		100%	<u>2,780,000,000.00</u>
2.12.01.2.06.01	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor yang tersedia		6 Kec	<b>Dana</b> <u>50,000,000</u>  a. Belanja Operasi : 50,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 50,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		6 Kec	<u>55,000,000</u>  55,000,000  55,000,000
2.12.01.2.06.01	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah bahan pembersih yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	<b>Dana</b> <u>1,750,000,000</u>  a. Belanja Operasi : 1,750,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 1,750,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		12 bulan	<u>1,830,000,000</u>  1,830,000,000  1,830,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiruan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.06.02	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah penyediaan bahan logistik pelayanan 24 kec	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	<b>Dana</b> <u>200,000,000</u> a. Belanja Operasi : 200,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 200,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		12 bulan	<u>220,000,000</u> 220,000,000
2.12.01.2.06.05	4 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	30 Jenis	<b>Dana</b> <u>50,000,000</u> a. Belanja Operasi : 50,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 50,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		30 Jenis	<u>60,000,000</u> 60,000,000 60,000,000
2.12.01.2.06.07	5 Penyediaan Bahan / Material	Jumlah penyediaan ATK dinas	Dispenduk dan Pencapil	50 Jenis	<b>Dana</b> <u>100,000,000</u> a. Belanja Operasi : 100,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 100,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		50 Jenis	<u>125,000,000</u> 125,000,000 125,000,000
2.12.01.2.06.08	6 Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah mamin tamu	Dispenduk dan Pencapil	550 Orang	<b>Dana</b> <u>45,000,000</u> a. Belanja Operasi : 45,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 45,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		550 Orang	<u>50,000,000</u> 50,000,000 50,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.01.2.06.09	7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah rapat koordinasi luar daerah yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	89 kali	<b>Dana</b> <u>400,000,000.00</u>	DAU		89 kali	<u>440,000,000.00</u>
					a. Belanja Operasi : 400,000,000.00				440,000,000
					Belanja Pegawai : 0.00				
					Belanja barang & jasa : 400,000,000.00				440,000,000
					Belanja Bunga				
					Belanja Subsidi				
					Belanja Hibah				
					Belanja Bantuan				
					b. Belanja Modal				
					c. Belanja Tidak Terduga				
					d. Belanja Transfer				
2.12.01.2.07	3 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	<u>1,400,000,000.00</u>	DAU		100%	<u>1,180,000,000.00</u>
2.12.01.2.07.02	1 Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional	Jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional	Dispenduk dan Pencapil	2 R2 dan 3 R4	<b>Dana</b> <u>500,000,000</u>	DAU		2 R2 dan 3 R4	<u>175,000,000</u>
					a. Belanja Operasi : -				
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : -				
					Belanja Bunga				
					Belanja Subsidi				
					Belanja Hibah				
					Belanja Bantuan				
					b. Belanja Modal : 500,000,000			175,000,000	
					c. Belanja Tidak Terduga : -				
					d. Belanja Transfer : -				
2.12.01.2.07.05	2 Pengadaan Mebel	Jumlah biaya pengadaan mebeleur yang tersedia	Dispenduk dan Pencapil	35 unit	<u>100,000,000</u>	DAU		35 unit	<u>125,000,000</u>
					a. Belanja Operasi : -				
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : -				
					Belanja Bunga				
					Belanja Subsidi				
					Belanja Hibah				
					Belanja Bantuan				
					b. Belanja Modal : 100,000,000			125,000,000	
					c. Belanja Tidak Terduga : -				
					d. Belanja Transfer : -				
2.12.01.2.03.	3 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dispenduk dan Pencapil	40 Unit	<u>800,000,000</u>	DAU		40 Unit	<u>880,000,000</u>
					a. Belanja Operasi : -				
					Belanja Pegawai : -				
					Belanja barang & jasa : -				

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : 800,000,000 c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				880,000,000
2.12.01.2.08	3 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	<u>335,000,000.00</u>	DAU		100%	<u>365,000,000.00</u>
2.12.01.2.08.01	1 Penyediaan Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia (jasa pos)	Dispenduk dan Pencapil	12 bulan	<b>Dana</b> <u>45,000,000</u> a. Belanja Operasi : 45,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 45,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU	12 bulan	50,000,000	
2.12.01.2.08.02	2 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet dan surat kabar	Dispenduk dan Pencapil dan 24 kec	3 jenis rekening utk 25 lokasi	<b>Dana</b> <u>275,000,000</u> a. Belanja Operasi : 275,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 275,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU	3 jenis rekening utk 25 lokasi	290,000,000	
2.12.01.2.08.04	3 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah pembayaran telpon, air, dan internet dan surat kabar	Dispenduk dan Pencapil dan 24 kec	24 kecamatan	<b>Dana</b> <u>15,000,000</u> a. Belanja Operasi : 15,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 15,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi	DAU	24 kecamatan	25,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiruan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Hibah Belanja Bantuan : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				
2.12.01.2.09	3 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pemenuhan jumlah kegiatan Administrasi Umum	Dispenduk dan Pencapil	100%	<b>615.000.000.00</b>	DAU		100%	<b>715.000.000.00</b>
2.12.01.2.09.02	4 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan BBM, jasa servis, suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan	Dispenduk dan Pencapil	20 Unit	<b>Dana 350.000.000</b>	DAU		20 Unit	390.000.000
					a. Belanja Operasi : 350.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 350.000.000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -			390.000.000	390.000.000
2.12.01.2.09.06	4 Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang dipelihara	Dispenduk dan Pencapil	-	<b>Dana -</b>	DAU		-	
					a. Belanja Operasi : - Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
2.12.01.2.09.06	4 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Penyediaan BBM, jasa servis, suku cadang, asuransi dan pajak kendaraan	Dispenduk dan Pencapil	50 Unit	<b>Dana 150.000.000</b>	DAU		50 Unit	200.000.000
					a. Belanja Operasi : 150.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 150.000.000 Belanja Bunga			200.000.000	200.000.000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2.12.02.2.01.04	2 Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah laporan hasil peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk	Dispenduk dan Pencapil	24 Kec	<b>Dana</b> <u>75.000.000</u>  a. Belanja Operasi : 75,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 75,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		24 Kec	90,000,000  90,000,000  90,000,000
2.12.02.2.01	2 <b>Penataan Pendaftaran Penduduk</b>	<i>Persentase cakupan kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk</i>			<u>400.000.000</u>				<u>450.000.000</u>
2.12.02.2.02.07	1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir,	Penggandaan Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk,	Dispenduk dan Pencapil	1paket	<b>Dana</b> <u>400.000.000</u>  a. Belanja Operasi : 400,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 400,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		1paket	450,000,000  450,000,000  450,000,000
2.12.02.2.01	3 <b>Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk</b>	<i>Persentase cakupan kepemilikan dokumen pencatatan sipil</i>			<u>100.000.000</u>				<u>100.000.000</u>
2.12.02.2.02.07	1 Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pendaftaran penduduk	Dispenduk dan Pencapil		<b>Dana</b> <u>100.000.000</u>  a. Belanja Operasi : - Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : -	DAU			100,000,000  100,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prkiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
2.12.02.2.01	2 Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk				: 150.000.000				165.000.000
2.12.02.2.02.07	1 Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Monitoring dan evaluasi pelayanan berbasis daring di tingkat desa dan kecamatan	Dispenduk dan Pencapil	348 desa (E kios PAK LADJ)	Dana 150.000.000 a. Belanja Operasi : 150.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 150.000.000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		348 desa (E kios PAK LADJ)	165.000.000 165.000.000 165.000.000
2.12.03	III PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Persentase cakupan kepemilikan dokumen akte Kelahiran	Dispenduk dan Pencapil	85%	499.816.500	APBD		87.5%	630.000.000
2.12.03.2.01	1 Pelayanan Pencatatan Sipil		Dispenduk dan Pencapil	85%	125.000.000			87.5%	220.000.000
2.12.03.2.01.01	1 Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil	Dispenduk dan Pencapil	10.000 dokumen	Dana 125.000.000 a. Belanja Operasi : 125.000.000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 125.000.000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		10.000 dokumen	135.000.000 135.000.000 135.000.000
2.12.02.2.02.07	1 Pengadaan Dokumen Kependudukan selain Blanko KTP-El, Formulir, dan buku terkait pendaftaran penduduk sesuai dengan kebutuhan	Pengandaan Formulir dan buku terkait pendaftaran penduduk, ribbon KTP	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	Dana 75.000.000 a. Belanja Operasi : 75.000.000	DAU		1 Paket	85.000.000 85.000.000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 75,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -			85,000,000	
2.12.02.2.01	2 Penyelenggaraan Pencatatan Sipil				299,816,500				325,000,000
2.12.02.2.02.06	1 Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil		Dana -	DAU			100,000,000
					a. Belanja Operasi : - Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -			100,000,000	
2.12.02.2.02.07	2 Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil pelayanan secara aktif pendaftaran peristiwa kependudukan dan pencatatan peristiwa penting terkait pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil	24 Kec	Dana 99,316,500	DAU		24 Kec	105,000,000
					a. Belanja Operasi : 99,316,500 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 99,316,500 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -			105,000,000	
									105,000,000
2.12.02.2.02.07	2 Sosialisasi terkait Pencatatan Sipil	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil	200 peserta	Dana 150,000,000	DAU		200 peserta	165,000,000



Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
2.12.03.2.01.05	2 Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen kerja sama pemanfaatan Data Kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	15 lembaga	<b>Dana</b> <u>100.000,000</u>  a. Belanja Operasi : 100,000,000 Belanja Pegawai : -  Belanja barang & jasa : 100,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU	15 lembaga	120,000,000	120,000,000
2.12.04.2.02	2 Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Dispenduk dan Pencapil	100%	<u>350,000,000</u>		100%	<u>445,000,000</u>	
	1 Koordinasi antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah di Kabupaten / Kota dalam penertiban pelayanan pendaftaran penduduk	Jumlah laporan hasil sosialisasi pencatatan sipil	Dispenduk dan Pencapil		<b>Dana</b> -  a. Belanja Operasi : - Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : - Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -			75,000,000	75,000,000
2.12.04.2.03.03	2 Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Penyediaan fasilitas PIK	Dispenduk dan Pencapil	24 kec dan 330 desa E kios PAK LADI	<b>Dana</b> <u>250,000,000</u>  a. Belanja Operasi : 250,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 250,000,000 Belanja Bunga	DAU	24 kec dan 330 desa E kios PAK LADI	260,000,000	260,000,000
								260,000,000	260,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -				
2.12.04.2.03.03	2 Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Penyediaan informasi kondisi data kependudukan	Dispenduk dan Pencapil	24 kecamatan	<b>Dana</b> <u>50,000,000</u> a. Belanja Operasi : 50,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 50,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		24 kecamatan	55,000,000 55,000,000 55,000,000
2.12.04.2.03.03	2 Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah laporan hasil sosialisasi terait PIKAK	Dispenduk dan Pencapil	300 peserta	<b>Dana</b> <u>50,000,000</u> a. Belanja Operasi : 50,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 50,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU		300 peserta	55,000,000 55,000,000 55,000,000
2.12.04.2.02	<b>2 Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		Dispenduk dan Pencapil	100%	<u>150,000,000</u>			100%	<u>175,000,000</u>
2.12.04.2.03.08	1 Bimbingan Teknis terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Laporan hasil bimbingan teknis terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pendayagunaan data	Dispenduk dan Pencapil	450 peserta	<b>Dana</b> <u>150,000,000</u> a. Belanja Operasi : 150,000,000 Belanja Pegawai : -	DAU		450 peserta	175,000,000 175,000,000

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					Belanja barang & jasa : 150,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :				175,000,000
<b>2.12.05</b>	<b>V PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN</b>	<b>Ketersediaan Data Base yang terkalifikasi</b>		100%	<b>215,000,000</b>	<b>APBD</b>		100%	<b>275,000,000</b>
2.12.05.2.01	1 Penyusunan Profil Kependudukan		Dispenduk dan Pencapil		<u>215,000,000</u>				275,000,000
2.12.05.2.01.01	1 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten / Kota	Jumlah data kependudukan Kabupaten / Kota	Dispenduk dan Pencapil	330 desa e kios PAK LADI	<b>Dana</b> <u>65,000,000</u> a. Belanja Operasi : 65,000,000 Belanja Pegawai : Belanja barang & jasa : 65,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : b. Belanja Modal : c. Belanja Tidak Terduga : d. Belanja Transfer :	DAU	330 desa e kios PAK LADI	100,000,000 100,000,000 100,000,000	
2.12.05.2.01.02	2 Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta kebutuhan yang lain	Jumlah dokumen profil data perkembangan dan proyeksi kependudukan serta kebutuhan yang lain	Dispenduk dan Pencapil	1 Paket	<b>Dana</b> <u>150,000,000</u> a. Belanja Operasi : 150,000,000 Belanja Pegawai : - Belanja barang & jasa : 150,000,000 Belanja Bunga Belanja Subsidi Belanja Hibah Belanja Bantuan : - b. Belanja Modal : - c. Belanja Tidak Terduga : - d. Belanja Transfer : -	DAU	1 Paket	175,000,000 175,000,000 175,000,000	

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
					a Belanja Operasi : 14,725,128,440.00 Belanja Pegawai : 6,970,517,000.00 Belanja barang & jasa : 7,754,611,440.00 Belanja Bunga : 0.00 Belanja Subsidi : 0.00 Belanja Hibah : 0.00 Belanja Bantuan : 0.00 b Belanja Modal : 1,400,000,000.00 c Belanja Tidak Terduga : 75,000,000.00 d Belanja Transfer : 0.00				15,504,794,940.00 7,200,000,000.00 8,304,794,940.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,180,000,000.00 85,000,000.00 0.00
					<b>TOTAL BELANJA PD : 16,200,128,440.00</b>				<b>16,769,794,940.00</b>

## BAB V PENUTUP

Renja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 merupakan dokumen perencanaan yang disusun karena terdapat hal-hal yang menuntut adanya penyesuaian terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Pasuruan Tahun 2024 - 2026 .

Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini memuat tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil beserta indikatornya, program, kegiatan dan sub kegiatan, serta target kinerja dan pagu indikatif program/kegiatan/sub kegiatan. Renja ini selanjutnya menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum disahkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun Anggaran 2024.

Dengan disusunnya Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini diharapkan dapat terwujud keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, serta pelaksanaan program kegiatan dan sub kegiatan pembangunan. Penetapan Renja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi pedoman semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasuruan, sehingga seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan akan dapat dicapai secara terukur, efektif dan efisien.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF